

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERHUBUNGAN



RENSTRA
Rencana Strategis
2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq dan hidayah-Nya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yang disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perhubungan yang merupakan dasar acuan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 (lima) tahun kedepan mulai tahun 2025. Penyusunan Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Rencana Strategis ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, namun kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas dan kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Benteng, 25 September 2025

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar,**

^

Drs. SUARDI, M.M.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	ii	
DAFTAR GAMBAR	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	3
	1.1 Latar Belakang.....	3
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
	1.3.1 Maksud.....	7
	1.3.2 Tujuan.....	8
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	9
	2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	9
	2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	9
	2.2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	20
	2.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	23
	2.2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	35
	2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	35
	2.2.1 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	35
	2.2.2 Isu Strategis.....	37
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
	3.1 Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	39
	3.1 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	.40
	3.3. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029	43
	3.4. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	45
BAB VI	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
BAB V	P E N U T U P	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	10
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Golongan Tahun 2024	21
Tabel 2.3	Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun 2024.....	211
Tabel 2.4	Data Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan Tahun 2024	211
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2024	244
Tabel 2.6	Data Volume Lalu Lintas dan Kapasitas Jalan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024	266
Tabel 2.7	Data Tambatan Perahu di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024	277
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	33
Tabel 2.9	Rumusan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	38
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	43
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	46
Tabel 3.4	Rumusan Arah Kebijakan Restra Perangkat Daerah.....	47
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	48
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	54
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	72
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan.....	73
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan	73
Tabel 4.6	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.....	10
------------	---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 260 dimana Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang telah disusun.

Seiring dengan ditetapkannya kepemimpinan Bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 2029, maka secara sinergi pula Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPERIDA dan pemangku kepentingan.

Penyusunan rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dan memperhatikan keselarasan dengan Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal, maupun masukan para *stake holders*.

Penyusunan Renstra memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar dan KLHS menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana atau program agar dampak dan/atau resiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar harus dapat mewujudkan sasaran penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bidang perhubungan. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar yang maju dan sejahtera tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Transportasi memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategik dalam Pembangunan Daerah. Transportasi berperan sebagai penggerak dan pendorong dalam memperlancar roda kegiatan perekonomian serta berperan penting dalam produksi, distribusi, dan arus pergerakan penumpang dan jasa ke seluruh pelosok wilayah.

Setiap instansi pemerintah selalu berusaha mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Government*). Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Selanjutnya Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta laporan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar 2025 – 2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan

- Evaluasi Penyelenggaraan 5 Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 288);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor .. Tahun ... tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun ... Nomor ...);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor .. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor);;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
 33. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 adalah :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029; dan
- b. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 adalah untuk :

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
- d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmen Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya, kinerja pelayanan perangkat daerah, keompok sasaran layanan, identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, serta isu strategis.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029..

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dalam yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah..

BAB V PENUTUP

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, disebutkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

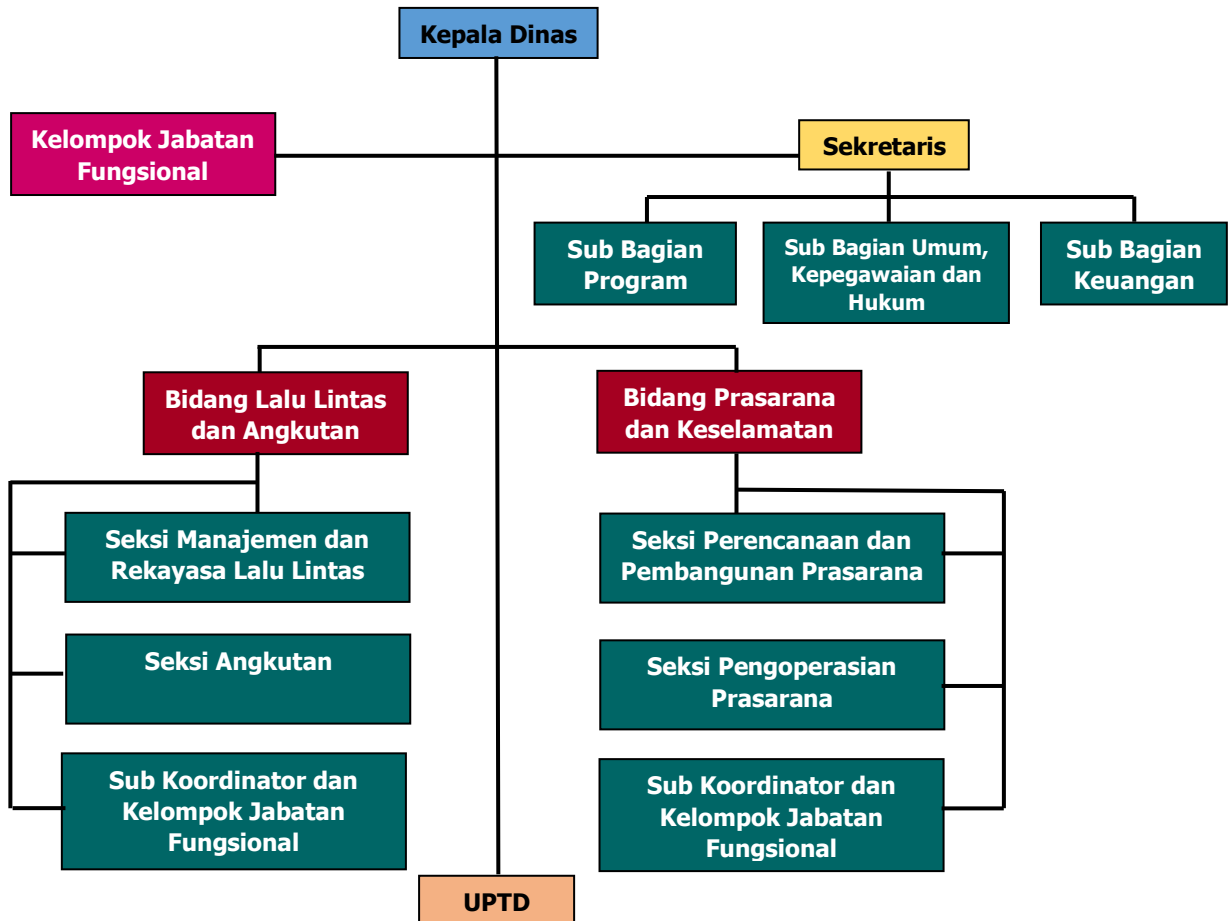
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Perparkiran;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Laut Lokal.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

(Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 25 Tahun 2024)

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing organ sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
Adapun uraian tugas pokok Kepala Dinas, yaitu :
- a. Menyusun rencana kerja dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis di bidang perhubungan;
 - g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - h. Melaksanakan evaluasi pelaporan daerah di bidang perhubungan;
 - i. Menyelenggarakan administrasi di bidang perhubungan;
 - j. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan teknis lalu lintas dan angkutan;
 - k. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan teknis prasarana dan keselamatan;
 - l. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - m. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - n. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perhubungan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi meliputi :
- a. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
 - b. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- Adapun uraian tugas pokok Sekretaris, yaitu :
- a. Menyusun rencana kerja Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi data, pelaporan, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur dinas;
- g. Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. Melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset dan dokumentasi;
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup dinas;
- j. Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup dinas;
- m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi tiga subbagian yaitu Subbagian Program, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, dan Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Subbagian Program, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja. Uraian tugas subbagian Program meliputi:
 - a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f) menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - g) memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
 - h) menyusun program dan kegiatan dinas dalam dokumen perencanaan;
 - i) menyusun dokumen evaluasi dinas;
 - j) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dinas;
 - k) memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah di bidang perhubungan;
 - l) mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi dinas;
 - m) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
 - n) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - o) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Program serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan. Uraian tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi :
- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g) melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
 - h) melakukan pengelolaan asset, perlengkapan dan rumah tangga;
 - i) mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
 - j) melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;

- k) melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - l) melakukan kearsipan dan ekspedisi;
 - m) melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitas, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
 - n) melakukan kebijakan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup dinas;
 - o) memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan;
 - p) memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perhubungan;
 - q) melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang perhubungan;
 - r) melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup dinas;
 - s) melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup dinas;
 - t) memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
 - u) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - v) menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - w) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - x) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Subbagian Keuangan, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi :
- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil Negara;

- g) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
 - h) melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - i) melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
 - j) menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
 - k) menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
 - l) menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;
 - m) menyusun laporan keuangan akhir tahun;
 - n) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - o) menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang lalu lintas dan angkutan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - d. Pelaksanaan administrasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi tiga seksi yaitu Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dan Seksi Angkutan dengan uraian tugas sebaagai berikut :
- 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas. Uraian Tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas :
 - a) menyusun rencana kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas;
 - g) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas;
 - h) melakukan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten;
 - i) menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan;
 - j) melakukan pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang dan barang;
 - k) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas;
 - l) menyiapkan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota;
 - m) melakukan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
 - n) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - o) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - p) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q) menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
 - r) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Angkutan, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Angkutan. Uraian tugas Seksi Angkutan:
- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Angkutan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) melakukan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah;

- g) melakukan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
 - h) melakukan penetapan rencana umum jaringan trayek;
 - i) melakukan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan;
 - j) melakukan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang;
 - k) melakukan pembinaan bagi pengusaha angkutan darat dan sopir angkutan darat;
 - l) memberikan rekomendasi terhadap pengoperasian bus;
 - m) melakukan pengawasan dan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan;
 - n) menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
 - o) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang angkutan;
 - p) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - q) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - s) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan, mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan keselamatan. Untuk melaksanakan tugas yang diemban Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan keselamatan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang prasarana dan keselamatan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan keselamatan;
 - d. Pelaksanaan administrasi di bidang prasarana dan keselamatan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- Bidang Prasarana dan Keselamatan membawahi tiga seksi yaitu :
- 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis Perencanaan dan Pembangunan Prasarana. Uraian Tugas Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana :
 - a) menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) melakukan penetapan rencana induk daerah lingkungan kerja / daerah lingkungan kepentingan pelabuhan punggungan lokal;
 - g) melakukan fasilitasi kajian rekomendasi penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan punggungan lokal;
 - h) melakukan pembangunan dan fasilitasi kajian rekomendasi penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin pekerjaan, pengerukan di wilayah perairan pelabuhan punggungan lokal;
 - i) melakukan fasilitasi kajian rekomendasi penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan punggungan lokal;
 - j) melakukan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
 - k) membuat data base sarana dan prasarana perhubungan;
 - l) melakukan pengadaan dan pemasangan, pengelolaan serta pemeliharaan area traffic control system;
 - m) melakukan analisis perencanaan sarana dan prasarana;
 - n) melakukan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota;
 - o) melakukan penyediaan rambu-rambu lalu lintas angkutan dan penyeberangan dalam wilayah daerah;
 - p) mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana;
 - q) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - r) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s) menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Pengoperasian Prasarana, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengoperasian Prasarana. Uraian tugas Seksi Pengoperasian Prasarana, meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengoperasian Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau, menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) melakukan fasilitas kajian rekomendasi penertiban izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - g) melakukan fasilitas kajian rekomendasi penertiban izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
 - h) melakukan fasilitas kajian rekomendasi penertiban izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
 - i) melakukan fasilitas kajian rekomendasi penertiban izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (Dua Puluh Empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - j) melakukan fasilitas kajian rekomendasi penertiban izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (di dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan) pelabuhan pengumpan lokal;
 - k) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian prasarana;
 - l) melakukan pengelolaan operasional sarana;
 - m) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan operasional prasarana;
 - n) melakukan pemantauan / pengawasan terhadap pengoperasian sarana perhubungan;
 - o) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengoperasian prasarana;
 - p) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - q) menilai kinerja pegawai negeri sipil Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - r) menyusun laporan pelaksanaan Tugas kepada Seksi Pengoperasian Prasarana dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - s) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan rancangan kebijakan teknis, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian di

bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas yang diembannya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan yang terdapat dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Pelayanan fasilitasi pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dinas Perhubungan membawahi Unit Pelaksana Teknis Dinas antara lain:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Perparkiran;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Laut Lokal.

2.2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar per Desember 2024 terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 50 orang pegawai yang terdiri dari 37 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	S2	3	4	7	
2.	S1	16	7	23	
3.	D3	8	1	9	
4.	SLTA	10	1	11	
5.	SLTP	-	-	-	
6.	SD	-	-	-	
Total		37	13	50	

Sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan golongan ruang per Desember 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah	Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
1.	IV	2	2	4	
2.	III	30	11	41	
3.	II	5	-	5	
4.	I	-	-	-	
Total		37	13	50	

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan yang menduduki jabatan Eselon pada Tahun 2024 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun 2024

No.	Eselon	Jumlah Pegawai		Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1	2	3	4	5
1.	Eselon IIB (Kepala Dinas)	1	-	
2.	Eselon IIIA (Sekretaris)	-	1	
3.	Eselon IIIB (Kepala Bidang)	1	1	
4.	Eselon IVA (Kepala Seksi/Kasubag./Kepala UPTD)	8	3	
5.	Eselon IVB (Kasubag. TU)	3	1	
Total		13	6	

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Begitupun dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun sarana dan prasarana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Data Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan Tahun 2024

No.	Jenis Aset	Volume	Keterangan
1	2	3	4
1	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	348 m ²	Jl. Jammeng, Kab. Kepulauan Selayar
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	483 m ²	Jl. R.E. Martadinata Kelurahan Benteng
3	Tanah Bangunan Terminal Darat	6166 m ²	Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng
4	Rumah Singgah	1 Unit	Baik
5	Bangunan Gedung Kantor	6 Unit	Baik
6	Sepeda Motor	32 Unit	Baik

No.	Jenis Aset	Volume	Keterangan
1	2	3	4
7	Mobil	8 Unit	Baik
8	Bus	1 Unit	Baik
9	Kapal Motor	2 Unit	Baik
10	Meja ½ Biro	5 Buah	Baik
11	Meja Tamu	4 Buah	Baik
12	Meja Rapat	2 Buah	Baik
13	Meja Kerja Pejabat	4 Buah	Baik
13	Meja Kerja Kayu	18 Buah	Baik
14	Meja Kerja Besi / Metal	2 Buah	Baik
15	Meja Komputer	3 Buah	Baik
16	Kursi Kerja Pejabat	17 Buah	Baik
17	Kursi Tamu	8 Buah	Baik
18	Kursi Rapat	3 Buah	Baik
19	Kursi Putar	5 Buah	Baik
20	Kursi Lipat	9 Buah	Baik
21	Kursi Plastik	1 Buah	Baik
22	Kursi Besi / Metal	1 Buah	Baik
23	Bangku Tunggu	1 Buah	Baik
24	Sofa	1 Buah	Baik
25	Lemari Kayu	4 Buah	Baik
26	Lemari Besi / Metal	5 Buah	Baik
27	Lemari Kaca	2 Buah	Baik
28	Lemari Sorok	2 Buah	Baik
29	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 Buah	Baik
30	Rak Besi	1 Buah	Baik
31	Filling Cabinet Besi	11 Buah	Baik
32	Brandkas	1 Buah	Baik
33	AC	12 Unit	Baik
34	Sound System	3 Unit	Baik
35	Faximile	2 Unit	Baik
36	Mesin Potong Rumput	3 Unit	Baik
37	Unit Tranceiver SSB Portable	3 Unit	Baik
38	TV	6 Unit	Baik
39	Komputer PC	13 Unit	Baik
40	Printer	31 Unit	Baik
41	UPS	4 Unit	Baik
42	Camera Digital	8 Unit	Baik
43	Handy Talky	38 Unit	Baik
44	Laptop	32 Unit	Baik
45	Buffet Kayu	1 Buah	Baik
46	Buffet Kaca	1 Buah	Baik
47	Lampu Sorot Putar	Buah	
48	Tempat Tidur	1 Buah	Baik
49	Note Book	3 Unit	Baik
50	Hard Disk	1 Unit	Baik
51	Stavolt	Unit	
52	Mesin Pompa Air	1 Unit	Baik
53	Traffic Light	1 Buah	Baik
54	VHF	1 Unit	Baik

No.	Jenis Aset	Volume	Keterangan
1	2	3	4
55	Alat Komunikasi Radio VHF Lainnya	2 Unit	Baik
56	Proyektor	2 Unit	Baik
57	Viewer	1 Unit	Baik
58	Handycam	Unit	
59	CCTV	1 Unit	Baik
60	Mesin Absensi	1 Unit	Baik
61	GPS	1 Unit	Baik
62	Server	1 Unit	Baik
63	Lemari Es	3 Unit	Baik
64	Dispenser	3 Unit	Baik
65	Jam Elektronik & Mekanis	2 Unit	Baik
66	Generator Set / MB (Besi)	1	
67	Mesin Ketik Manual Portable	2 Unit	Baik
68	Alat Pemadam	1 Unit	Baik
69	Alat Dapur	4 Unit	Baik
70	Alat Rumah Tangga Lainnya	71 Unit	Baik
71	Alat Keamanan Lainnya	4 Unit	Baik
72	Target Drone	10 Unit	Baik

2.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah merencanakan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang direncanakan terdapat berbagai kendala dengan pendanaan yang terbatas oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah maupun pihak-pihak lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung terwujudnya program pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2024**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Pada Tahun			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	7	8	9	10	13	14	15	16	19	20	21	22
3.9.1	Persentase kinerja lalu lintas kabupaten			n/a	30,69	30,77	30,85	-	25,23	26,51	27,75	-	82,21	86,16	89,95
3.9.2	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi			n/a	55,73	60,66	63,94	37,50	41,38	43,10	44,83	-	74,25	71,06	70,11
3.9.3	Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang diterbitkan			n/a	0	100%	100%	0	0	0	0	-	-	-	-
9.1.2 (a)	Jumlah Bandara			1	1	1	2	1	1	1	1	100	100	100	50,00
9.1.2 (b)	Jumlah Dermaga Penyeberangan			2	2	3	4	2	2	2	2	100	100	66,67	50,00
9.1.2 (c)	Jumlah Pelabuhan Strategis			7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 2.5 diatas, capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar periode Tahun 2021-2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten, diukur dengan indikator kinerja V/C jalan digunakan untuk mengetahui seberapa baik sistem transportasi pada suatu kabupaten berfungsi dalam mendukung mobilitas masyarakat, barang, dan jasa, sekaligus memastikan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi perjalanan. Kinerja lalu lintas menyatakan kualitas pelayanan suatu segmen jalan terhadap arus lalu lintas yang dilayaninya yang dinyatakan oleh nilai-nilai derajat kejenuhan (D_j) dan kecepatan tempuh (vT). Nilai D_j mencerminkan kuantitas pelayanan jalan berkaitan dengan kemampuan jalan mengalirkan arus lalu lintas, apakah segmen jalan yang ada memberikan pelayanan yang baik atau dimensi jalan yang ada mengalami masalah.

Capaian Kinerja Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten mengalami kenaikan dari tahun 2021-2024 namun pada tahun 2021 tidak terealisasi karena masih dalam masa pandemi Covid-19, tahun 2022 memiliki capaian kinerja sebesar 25,23% dari target capaian yang ditetapkan sebesar 30,69% dengan rasio capaian sebesar 82,21%, tahun 2023 memiliki capaian kinerja sebesar 26,51% dari target kinerja yang direncanakan sebesar 30,77% dengan rasio capaian sebesar 86,16%, dan pada tahun 2024 capaian kinerja yang dicapai sebesar 27,75% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 30,85% dengan rasio capaian kinerja sebesar 89,95%.

Secara umum tren peningkatan Capaian Kinerja Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan frekuensi kendaraan yang tergolong rendah berarti bahwa:

- a. Adanya peningkatan kualitas layanan transportasi dimana waktu tempuh menjadi semakin efisien dan jadwal angkutan publik makin teratur.
- b. Keselamatan pengguna jalan terjamin seperti penurunan angka kecelakaan meskipun lalu lintas relatif lengang, dan perbaikan fasilitas keselamatan (rambu, marka, dan lampu lalu lintas) yang membuat perjalanan lebih aman.
- c. Aksesibilitas dan konektivitas lebih baik dimana rute transportasi menjadi lebih terhubung termasuk integrasi jadwal angkutan.

Data capaian kinerja Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2024 nampak pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Data Volume Lalu Lintas dan Kapasitas Jalan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

No.	Variabel	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Volume Lalu Lintas Jalan (V)	-	354	372	376
2	Kapasitas Jalan (C)	-	1.403	1.403	3.512
Kinerja Lalu Lintas (V/C)		-	25,23	26,51	27,75

2. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi, diukur dari perbandingan Tambatan Perahu dalam Kondisi Baik dengan Jumlah Total Tambatan Perahu yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Indikator ini digunakan untuk mengetahui ketersediaan dan kelayakan fasilitas transportasi laut yang dapat digunakan dengan aman dan nyaman di suatu kabupaten. Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kenaikan dari tahun 2021-2024, dimana pada tahun 2021 memiliki capaian kinerja sebesar 37,50% sementara tidak terdapat target capaian pada tahun 2021 karena kinerja ini baru diimplementasikan pada Perubahan Renstra yang disusun pada tahun 2022, selanjutnya pada tahun 2022 memiliki capaian kinerja sebesar 41,83% dari target capaian yang ditetapkan sebesar 55,73% dengan rasio capaian sebesar 74,25%, pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah sebesar 43,10% dari target kinerja yang direncanakan sebesar 60,66% dengan rasio capaian sebesar 71,06%, dan pada tahun 2024 capaian kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi adalah dicapai sebesar 44,82% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 63,94% dengan rasio capaian kinerja adalah sebesar 70,11%. Secara umum tren peningkatan Capaian Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi di Kabupaten Kepulauan Selayar berarti bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan dalam rangka pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar baik daratan maupun kepulauan berjalan efektif yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan, kepuasan publik sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan. Capaian tersebut berbanding terbalik dengan Rasio Capaian Kinerja yang mengalami penurunan dari tahun 2021-2024. Hal ini berarti bahwa kinerja yang dicapai belum memenuhi harapan atau ada hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak pada penurunan kualitas layanan pada sektor perhubungan laut, berpotensi memicu keluhan dari Masyarakat pengguna layanan transportasi laut, sehingga ke depan dibutuhkan adanya evaluasi dan perbaikan dari seluruh pengambil Keputusan dalam rangka terwujudnya tujuan Pembangunan daerah.

Data capaian kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2024 nampak pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Data Tambatan Perahu di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

No.	Nama Tambatan Perahu	Lokasi		Tahun			
		Desa	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TP. Labuan Nipayya	Bungaiya	Bontomatene	Rencana	Baru/Baik	Baik	Baik
2	TP. Pulau Pasi	Menara Indah	Bontomatene	Rencana	Baru/Baik	Baik	Baik
3	TP. Langsangireng	Bontona Saluk	Bontomatene	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
4	TP. Tanaera	Tanete	Bontomatene	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
5	TP. Buki	Buki	Buki	Baik	Baik	Baik	Baik
6	TP. Parak	Parak Selatan	Bontomanai	Baik	Baik	Baik	Baik
7	TP. Manarai	Bontoborusu	Bontoharu	Baik	Baik	Baik	Baik
8	TP. Padang	Bontosunggu	Bontoharu	Baik	Baik	Baik	Baik
9	TP. Gusung Timur	Bontolebang	Bontoharu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
10	TP. Gusung Lengu (Barat)	Bontolebang	Bontoharu	Rencana	-	-	-
11	TP. Bontotangnga	Bontotangnga	Bontoharu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
12	TP. Dongkalang	Bontoborusu	Bontoharu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
13	TP. Dopa	Kahu Kahu	Bontoharu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
14	TP. Kahu-Kahu	Kahu Kahu	Bontoharu	Rusak	Rusak	Rusak	Baik/rehab
15	TP. Bahuluang (Selatan)	Bahuluang	Bontosikuyu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
16	TP. Bahuluang (Utara)	Bahuluang	Bontosikuyu	Baik	Baik	Baik	Baik
17	TP. Tambolongan Lappe (Barat)	Tambolongan	Bontosikuyu	Rencana	Rusak	Rusak	Rusak
18	TP. Tambolongan (Barat)/Lemba	Tambolongan	Bontosikuyu	Baik	Baik	Baik/Rehab	Baik
19	TP. Tangga tangga (Timur)	Tambolongan	Bontosikuyu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
20	TP. Polassi	Polasssi	Bontosikuyu	Baik/ Pembangunan	Baik	-	-
21	TP. Dusun Barakka	Polassi	Bontosikuyu	Baik	Baik	Baik/ Penambahan	Baik
22	TP. Bukit Nane	Timur Desa Polasi	Bontosikuyu	-	-	Baik/Baru	Baik
23	TP. Dusun Letta	Polassi	Bontosikuyu	-	-	Rusak	Rusak
24	TP. Appatana (Timur)	Appatana	Bontosikuyu	Baik	Baik	Baik/Rehab	Baik
25	TP. Babana Lowa	Lowa	Bontosikuyu	Baik	Baik	Baik	Baik
26	TP. Laiyolo	Laiyolo	Bontosikuyu	Baik/ Pembangunan	Baik	Baik	Baik
27	TP. Lantibongan	Lantibongan	Bontosikuyu	Rencana	Rencana	Rencana	Rencana
28	TP. Bonetaringan	Appatana	Bontosikuyu	Rencana	Rencana	-	-
29	TP. Tarupa	Tarupa	Takabonerate	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
30	TP. Latondu	Latondu	Takabonerate	Baik/ Pembangunan	Baik	Baik	Baik
31	TP. Rajuni	Rajuni	Takabonerate	Baik/ Pembangunan	Baik	Baik/ Pembangunan	Baik
32	TP. Jinato	Jinato	Takabonerate	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
33	TP. Pasitallu Timur	Pasitallu	Takabonerate	Baik/ Pembangunan	Baik	Baik	Baik

No.	Nama Tambatan Perahu	Lokasi		Tahun			
		Desa	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
34	TP. Pasitallu Tengah	Tambuna	Takabonerate	Baik	Baik	Baik/ Pembangu nan	Baik
35	TP. Bonelambere	Nyiur Indah	Takabonerate	Rusak	Baik	Baik	Baik
36	TP. Batang	Batang	Takabonerate	Baik	Baik	Baik/rehab	Baik
37	TP. Kampung Bajo	Kayuadi	Takabonerate	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
38	TP. Mangatti	Labuang Pamajang	Pasimasunggu	Baik	Baik	Baik	Baik
39	TP. Tanamalala 2	Tanamalala	Pasimasunggu	Baik	-	-	-
40	TP. Tanamalala	Tanamalala	Pasimasunggu	Rusak	Baik	Baik	Baik/rehab
41	TP. Kayu Anging	Massungke	Pasimasunggu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
42	TP. Kampung tangga	Teluk Kampe	Pasimasunggu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
43	TP. Mare'ge	Maminasa	Pasimasunggu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
44	TP. Binanga Nipa	Bontosaile	Pasimasunggu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
45	TP. Pakangkang barat	Maminasa	Pasimasunggu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
46	TP. Lembongan	Bontobaru	Pasimasunggu Timur	Rusak	Rusak	Baik/rehab	Baik
47	TP. Erelompa	Bontomalling	Pasimasunggu Timur	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
48	TP. Bonelambere	Lembang Baji	Pasimasunggu Timur	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
49	TP. Pakangkang Timur	Lembang Baji	Pasimasunggu Timur	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
50	TP. Bontobulaeng (Ujung)	Bontobulaeng	Pasimasunggu Timur	Baik	Baik	Baik	Baik
51	TP. Sambali	Sambali	Pasimarannu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
52	TP. Bonerate	Bonerate	Pasimarannu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
53	TP. Miantuu	Lamantu	Pasimarannu	Rusak	Rusak	-	-
54	TP. One Timur	Bonea	Pasimarannu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
55	TP. Lambego	Lambego	Pasimarannu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
56	TP. Komba Komba	Kembang Miati	Pasimarannu	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
57	TP. Karumpa Barat	Karumpa	Pasilambena	Baik/ Pembangun an	Baik	Baik	Baik
58	TP. Karumpa Timur	Karumpa	Pasilambena	Baik	Baik	Baik	Baik
59	TP. Buranga	Garaupa	Pasilambena	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
60	TP. Garaupa	Garaupa Raya	Pasilambena	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
61	TP. Latokdok	Kalaotoa	Pasilambena	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
62	TP. Tee huu	Pulau Madu	Pasilambena	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
63	TP. Tadu	Lembang Matene	Pasilambena	Rusak/ Hilang	Rusak/ Hilang	Rusak/ Hilang	Rusak
64	TP. Liaganda	Pulau Madu	Pasilambena	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
Jumlah Tambatan Perahu				56	58	58	58
Baik				21	24	25	26
Rusak				35	34	33	32

3. Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang diterbitkan, diukur dari perbandingan Jumlah Rekomendasi IMB Helipad yang diterbitkan dengan Jumlah permohonan rekomendasi IMB helipad yang diterima. Indikator ini digunakan untuk mengukur Tingkat kecepatan dan kemampuan pelayanan perangkat daerah terkait dalam menindaklanjuti permohonan rekomendasi IMB helipad; mengetahui dan memastikan Pembangunan helipad sesuai persyaratan teknis, keselamatan dan tata ruang; serta mendorong ketersediaan fasilitas pendaratan helicopter yang legal dan aman.

Capaian Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang diterbitkan di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2021-2024 tidak terealisasi, hal ini karena tidak ada permohonan permintaan rekomendasi pembangunan helipad yang diterima. Salah satu penyebab tidak terealisasinya capaian kinerja ini adalah untuk di wilayah daratan sudah adanya bandara H. Aroepala yang lokasinya tidak jauh dari ibu kota Kabupaten yang bisa dijadikan alternatif helipad; lalu lintas helikopter di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sangat rendah sehingga investasi helipad masih dipandang tidak optimal; serta pembangunan helipad di kawasan Taman Nasional Takabonerate akan menimbulkan kerusakan lingkungan pada Kawasan lindung Taman Nasional Takabonerate.

4. Jumlah Bandara, dilihat dari jumlah bandara yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Saat ini satu-satunya bandara yang resmi berdiri dan beroperasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Bandara H. Aroepala yang dirintis pada tahun 2000 dan diresmikan pada tanggal 17 September 2000 oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Agum Gumelar. Fasilitas landasan pacu awal berukuran 1.950 m x 23 m yang dilayani oleh angkutan udara perintis dengan pesawat seperti CASA 212. Pada tahun 2014 karena lonjakan penumpang sejak masuknya penerbangan komersial dibangun terminal baru seluas 2.000 m² yang mampu menampung sekitar 200 orang penumpang pada saat sibuk. Saat ini direncanakan dan diupayakan perpanjangan landasan pacu menjadi 2.400 m agar pesawat berbadan lebih besar seperti Boeing dapat mendarat.
5. Jumlah Dermaga Penyeberangan, dapat dilihat dari banyaknya Pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di wilayah tertentu. Sampai tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 2 (dua) Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi yaitu Pelabuhan Penyeberangan Pamatata dan Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang. Kedua Pelabuhan ini memiliki peran yang sangat penting bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dimana Pelabuhan Penyeberangan Pamatata selain sebagai pintu gerbang dan akses transportasi antara Kepulauan Selayar dengan daerah-daerah lain yang ada di daratan Pulau Sulawesi terutama menuju ke Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Pelabuhan Penyeberangan Pamatata juga berperan sebagai jalur pendukung ekonomi, sosial, hingga pariwisata. Sementara untuk Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang adalah satu-satunya akses transportasi darat yang menghubungkan daratan Selayar dengan wilayah kepulauan yang terdiri dari lima kecamatan yang tentunya diharapkan mampu menopang mobilitas harian masyarakat terutama Masyarakat kepulauan, distribusi logistik, dan mobilitas ekonomi sehingga terwujud pemerataan Pembangunan. Untuk lebih memaksimalkan dan memudahkan akses transportasi darat ke wilayah kepulauan, maka sampai tahun 2024 telah rampung dibangun di tiga titik Lokasi Pelabuhan Penyeberangan berbasis

plengsengan, yaitu Latokdok Kecamatan Pasilambena, Lamantu Kecamatan Pasimarannu, dan Nyiur Indah Kecamatan Takabonerate yang nantinya akan diresmikan pengoperasiannya pada bulan November tahun 2025. Selain ke tiga Lokasi tersebut direncanakan pula Pembangunan Pelabuhan plengsengan di Kecamatan Pasimasunggu dimana pada tahun 2025 ini sudah masuk proses pembebasan lahan dengan alokasi anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

6. Jumlah Pelabuhan Strategis dapat dilihat dari jumlah Strategis yang beroperasi di wilayah tertentu. Pelabuhan laut memiliki fungsi yang sangat vital dalam pelaksanaan Pembangunan suatu wilayah, antara lain fungsi Pelabuhan Laut adalah 1) sebagai gerbang pergerakan kapal dengan menjadi tempat layanan kapal penumpang, kapal barang, kapal penyeberangan, tol laut, hingga kapal internasional; 2) sebagai penghubung antarwilayah yang menghubungkan pulau-pulau, kota, bahkan negara melalui jalur laut; dan 3) sebagai tempat transit dan singgah kapal untuk mengisi bahan bakar, air, atau perbekalan.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini terdapat tujuh unit Pelabuhan laut yang beroperasi, yaitu 1) Pelabuhan Pamata; 2) Pelabuhan Rauf Rahman Benteng; 3) Pelabuhan Kayuadi; 4) Pelabuhan Jampea; 5) Pelabuhan Jinato; 6) Pelabuhan Bonerate; dan 7) Pelabuhan Kalaotoa. Pada tahun 2025 dilaksanakan proses study Pembangunan Pelabuhan Laut di tiga titik Lokasi, antara lain 1) Penyusunan Dokumen FS Pelabuhan Laut Karumpa; 2) Penyusunan Dokumen RIP Pelabuhan Laut Tambolongan; dan 3) Penyusunan Dokumen RIP Pelabuhan Laut Pulo Madu.

Berdasarkan progress capaian dari beberapa indikator kinerja di atas terdapat dua indikator kinerja yang mengalami peningkatan capaian setiap tahun, yaitu :

1. Persentase kinerja lalu lintas kabupaten; dan
2. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan tersebut antara lain :

1. Volume lalu lintas yang masih tergolong rendah dibanding kapasitas jalan sehingga kinerja lalu lintas jalan tergolong tinggi.
2. Sebagian besar kendaraan pengguna jalan adalah kendaraan roda dua sehingga tidak memiliki dampak terhadap pengurangan kecepatan rata-rata kendaraan lain yang dapat menyebabkan timbulnya kemacetan.
3. Tersedianya anggaran untuk perawatan dan rehabilitasi serta peningkatan kapasitas sehingga mampu meningkatkan kelayakan dan fungsi sarana dan prasarana transportasi.

Terdapat empat indikator kinerja dengan capaian yang sama sejak tahun awal perencanaan, yaitu :

1. Jumlah Bandara;
2. Jumlah Dermaga Penyeberangan;
3. Jumlah Pelabuhan Strategis; dan

4. Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang diterbitkan.

Adapun faktor yang mempengaruhi sehingga capaian indikator kinerja tersebut tidak mengalami perubahan selama lima tahun periode Renstra antara lain :

1. Untuk Pembangunan bandara, Pelabuhan penyeberangan, dan Pelabuhan laut membutuhkan anggaran yang besar sementara kemampuan anggaran daerah sangat terbatas;
2. Pembangunan yang diusulkan belum masuk dalam prioritas Pembangunan nasional; dan
3. Sebagian pembangunan terkendala pada studi kelayakan (FS, Amdal, DED).

Adapun capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Ke-1 (2022)	Ke-2 (2023)	Ke-3 (2024)	Ke-4 (2025)	Ke-5 (2026)	Ke-1 (2022)	Ke-2 (2023)	Ke-3 (2024)	Ke-4 (2025)	Ke-5 (2026)	Ke-1 (2022)	Ke-2 (2023)	Ke-3 (2024)	Ke-4 (2025)	Ke-5 (2026)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.303.120.721	7.480.342.493	7.666.323.965	7.899.039.577	8.085.124.660	5.929.439.553	5.852.635.604	5.483.220.114	3.103.177.447	0	0,81	0,78	0,72	0,39	0,00	2,58	-37,75
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.000.000	36.000.000	41.000.000	51.000.000	111.000.000	44.725.000	18.638.200	5.989.000	0	0	1,24	0,52	0,15	0,00	0,00	38,98	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.001.450.000	5.078.324.142	5.080.824.142	5.080.824.142	5.080.824.142	4.211.752.840	4.265.672.830	4.377.613.763	2.633.327.977	0	0,84	0,84	0,86	0,52	0,00	0,40	-33,99
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	150.000.000	250.000.000	250.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.778.321	541.125.951	665.607.423	740.323.035	747.408.118	530.217.315	394.469.821	329.705.400	92.400.600	0	1,20	0,73	0,50	0,12	0,00	14,49	-53,50
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	50.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.368.220.400	1.368.220.400	1.368.220.400	1.368.220.400	1.374.220.400	807.414.518	687.669.493	529.265.861	243.136.626	0	0,59	0,50	0,39	0,18	0,00	0,11	-47,98
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.672.000	356.672.000	360.672.000	358.672.000	421.672.000	335.329.880	486.185.260	240.646.090	134.312.244	0	0,94	1,36	0,67	0,37	0,00	4,53	-37,43
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	1.780.000.000	1.797.999.200	1.740.500.120	1.782.254.718	1.824.779.315	979.610.007	1.103.945.690	580.811.100	79.825.000	0	0,55	0,61	0,33	0,04	0,00	0,65	-55,24
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	39.800.000	311.455.400	14.400.000	0	0	0,27	2,08	0,29	0,00	0,00	-11,89	0,00
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	650.000.000	650.000.000	670.000.000	932.000.000	940.000.000	865.377.957	611.489.290	547.659.200	69.877.000	0	1,33	0,94	0,82	0,07	0,00	10,76	-56,75
3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	70.000.000	70.000.000	90.000.000	130.000.000	132.000.000	55.257.050	76.171.000	18.751.900	1.548.000	0	0,79	1,09	0,21	0,01	0,00	18,64	-57,32
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	535.000.000	535.000.000	535.000.000	65.000.000	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,96	0,00
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	375.000.000	375.000.000	375.000.000	575.000.000	600.000.000	19.175.000	104.830.000	0	8.400.000	0	0,05	0,28	0,00	0,01	0,00	14,42	0,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Ke-1 (2022)	Ke-2 (2023)	Ke-3 (2024)	Ke-4 (2025)	Ke-5 (2026)	Ke-1 (2022)	Ke-2 (2023)	Ke-3 (2024)	Ke-4 (2025)	Ke-5 (2026)	Ke-1 (2022)	Ke-2 (2023)	Ke-3 (2024)	Ke-4 (2025)	Ke-5 (2026)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	0	17.999.200	20.500.120	25.254.718	27.779.315	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.490.000.000	1.510.398.100	1.548.203.364	1.585.344.763	1.623.171.089	2.312.036.931	5.549.678.082	453.826.316	60.644.820	0	1,55	3,67	0,29	0,04	0,00	2,16	-34,61
1	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0	0	247.368.752	0	0	2.582.580	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
2	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.490.000.000	1.510.398.100	1.548.203.364	1.585.344.763	1.623.171.089	2.064.668.179	5.549.678.082	453.826.316	58.062.240	0	1,39	3,67	0,29	0,04	0,00	2,16	-27,56
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	0	5.000.000	5.125.150	5.248.102	5.373.322	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
1	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	0	5.000.000	5.125.150	5.248.102	5.373.322	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL		10.573.120.721	10.793.739.793	10.960.152.599	11.271.887.160	11.538.448.386	9.221.086.491	12.506.259.376	6.517.857.530	3.243.647.267	0	1,00	115,87	0	0	0	2,21	-40,62

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas, dapat diketahui bahwa perbandingan anggaran dan realisasi hampir semua program memiliki gap signifikan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, antara lain:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan: anggaran pada tahun 2022 Rp 7.303.120.721 realisasi Rp 5.929.439.553 dengan rasio 0,81. Tahun 2025, dari anggaran Rp 7.899.039.577 sampai dengan semester pertama terealisasi Rp 3.103.177.447 dengan rasio 0,39;
- b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada tahun 2022 anggaran Rp 1.780.000.000 terealisasi Rp 979.610.007 dengan rasio 0,55. Tahun 2025, terealisasi Rp 79.825.000 dengan rasio 0,04; dan
- c) Program Pengelolaan Pelayaran, meski anggaran relatif stabil sekitar Rp 1,5 Miliar/tahun, namun realisasi memiliki fluktuatif tinggi, tahun 2023 melonjak Rp 5.549.678.082 melebihi dari anggaran yang direncanakan dengan rasio sebesar 3,67. Tahun 2025 sampai dengan semester pertama terealisasi sebesar Rp 60.644.820.

Dari Rasio antara Anggaran dan Realisasi tampak rata-rata rasio realisasi menurun dari tahun ke tahun banyak kegiatan dengan rasio $<0,5$, artinya kurang dari 50% anggaran yang dialokasikan benar-benar terealisasi. Beberapa program dan kegiatan bahkan nol realisasi, misalnya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, dan Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter. Sementara jika dilihat dari pertumbuhan anggaran dan realisasi, terlihat bahwa anggaran relatif tumbuh stabil sekitar 2–3% per tahun. Realisasi justru menunjukkan tren menurun tajam rata-rata pertumbuhan realisasi negatif, hingga -40,62%. Hal ini berarti, meskipun anggaran meningkat, kemampuan penyerapan dan eksekusi kegiatan justru memburuk.

Permasalahan utama dari penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain adalah:

- a) Perencanaan dan penganggaran tidak realistis dimana banyak kegiatan dianggarkan tapi tidak terlaksana;
- b) Rendahnya serapan anggaran antara lain disebabkan oleh hambatan teknis seperti proses lelang gagal, dokumen belum siap, terhambat regulasi;
- c) Fluktuasi ekstrim realisasi, misalnya program pelayaran tahun 2023 overspending Rp 5,5 Miliar dari anggaran Rp 1,5 Miliar, menandakan lemahnya kontrol.
- d) Program strategis Program Pengelolaan Penerbangan hanya dialokasikan anggaran dengan nilai kecil Rp 5.000.000 dan tidak terealisasi sama sekali.

Dari perencanaan dan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat disimpulkan bahwa Kinerja penyerapan anggaran Dinas Perhubungan masuk dalam kategori lemah dimana secara rata-rata realisasi turun hingga -40%, efisiensi anggaran termasuk rendah terlihat dari banyaknya alokasi

anggaran yang tidak digunakan, atau digunakan tidak sesuai perencanaan. Fokus perbaikan yang perlu diarahkan dan dilakukan kedepan antara lain adalah :

- a) Sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan kebutuhan riil dilapangan.
- b) Penguatan kapasitas pelaksanaan program terutama pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga pada Program Pengelolaan Pelayaran).
- c) Evaluasi mekanisme pengadaan agar tidak banyak anggaran menggantung.
- d) Pengendalian dan monitoring agar tidak ada lonjakan penggunaan anggaran atau penurunan realisasi anggaran secara ekstrem.

2.2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan unit kerja dalam struktur organisasi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melayani kelompok masyarakat antara lain :

1. Masyarakat Umum, yaitu kelompok terbesar yang menerima manfaat layanan Dishub, khususnya pengguna transportasi darat dan laut. Transportasi darat melayani mobilitas harian di dalam Pulau Selayar, Transportasi laut sangat vital karena sebagian besar penduduk tinggal di pulau-pulau kecil, sehingga ketergantungan terhadap kapal penumpang, ferry, dan perahu rakyat sangat tinggi, dan Transportasi udara (helipad/ bandara) walaupun belum beroperasi penuh, diharapkan mendukung evakuasi medis dan mobilitas pejabat maupun masyarakat dengan kebutuhan mendesak.
2. Pelaku Usaha dan Ekonomi, yaitu kelompok masyarakat yang meliputi operator angkutan, nelayan, pedagang, hingga pelaku pariwisata. Logistik antar pulau sangat penting bagi distribusi bahan pokok dan hasil bumi, Operator kapal rakyat menjadi tulang punggung distribusi barang dan penumpang, serta Pelaku pariwisata (khususnya Takabonerate) sangat bergantung pada kepastian transportasi laut dan akses darat yang memadai.
3. Instansi Pemerintah dan Aparatur, yaitu Instansi vertikal, TNI/Polri, Basarnas, dan BPBD membutuhkan dukungan transportasi dalam tugas pelayanan publik, keamanan, dan penanggulangan bencana. Transportasi darat diperlukan untuk mobilisasi pasukan dan peralatan dan Transportasi laut dan udara sangat krusial untuk operasi di pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil.

Dengan kondisi wilayah kepulauan, Dishub Selayar dituntut untuk memastikan layanan transportasi darat, laut, dan udara berjalan terintegrasi, terjangkau, dan berkelanjutan demi menjawab kebutuhan seluruh kelompok sasaran.

2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

2.2.1 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian dan kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek pelaksanaan tugas dan fungsi. Sesuai dengan rumusan masalah pada rancangan akhir RPJMD Kepulauan Selayar 2025-2029, dijabarkan 17 (tujuh belas) permasalahan pokok dimana Dinas Perhubungan terkait dengan permasalahan pertama yaitu **“belum optimalnya pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi”** dengan rumusan masalah pokok yaitu **“belum terlaksananya penerapan transportasi ramah lingkungan di kawasan perkotaan”**, akar permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah **“Ketersediaan fasilitas dan layanan aksesibilitas antarwilayah yang belum optimal”**.

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode tahun 2021 – 2024, inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas dan fungsi utama Dinas Perhubungan, serta karakteristik wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang unik, terdiri dari pulau besar dan pulau-pulau kecil yang tersebar di laut Flores dan Laut Banda, menuntut tersedianya layanan transportasi darat, laut, dan udara yang andal serta terintegrasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah permasalahan utama yang dihadapi Dinas Perhubungan, antara lain:

1. Keterbatasan dan menurunnya layanan transportasi, sebagai daerah kepulauan transportasi seharusnya menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat namun, masih terdapat permasalahan, yaitu Keterbatasan armada dan jadwal pelayaran yang tidak konsisten, Fasilitas pelabuhan dan dermaga belum memadai, banyak dermaga rakyat yang rusak atau tidak memiliki standar keselamatan;
2. Sarana dan prasarana transportasi belum memadai, dimana banyak fasilitas transportasi darat, laut, dan udara belum memenuhi standar. Pemeliharaan aset daerah tidak optimal disebabkan anggaran pemeliharaan seringkali kecil dibandingkan kebutuhan, karena prioritas lebih banyak diarahkan ke pembangunan fisik baru daripada perawatan rutin. Minimnya integrasi antarmoda membuat pelayanan kurang efisien, terutama untuk mendukung logistik antar pulau dan pariwisata.
3. Tingkat keselamatan lalu lintas yang masih tergolong rendah, ditandai dengan masih tingginya angka pelanggaran, kecelakaan, serta rendahnya kualitas sarana pendukung keselamatan jalan. Hal ini disebabkan oleh Fasilitas keselamatan jalan yang minim dan tidak terpelihara, Pengelolaan angkutan umum dan terminal yang lemah, Tidak optimalnya pengujian kendaraan bermotor, Kesadaran dan disiplin masyarakat yang rendah, dan Terbatasnya SDM dan lemahnya koordinasi antar instansi.

2.2.2 Isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis didasarkan pada isu global, nasional dan regional serta dirumuskan berdasarkan kajian KLHS RPJMD 2025-2029, Renstra kementerian/Lembaga lainnya yang dapat mempengaruhi tugas dan fungsi perangkat daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9 Rumusan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
		Global	Nasional	Regional	
Aksesibilitas layanan transportasi antarwilayah yang masih terbatas karena jumlah armada dan frekuensi layanan masih rendah	Infrastruktur	Perubahan iklim (<i>Climate Change</i>)	Krisis Lingkungan	Kontribusi Sulawesi Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional	Penguatan konektivitas antarwilayah baik daratan maupun kepulauan melalui pengadaan/ peremajaan armada dan penambahan frekuensi layanan transportasi
Sarana dan prasarana transportasi belum memadai					Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik dan aman
Keselamatan lalu lintas yang masih rendah					Penambahan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat sejumlah potensi permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi berkaitan erat dengan kondisi infrastruktur, dinamika lingkungan global–nasional–regional, serta tuntutan pelayanan masyarakat yang selanjutnya dirumuskan dalam isu-isu strategis Dinas Perhubungan dalam lima tahun ke depan tabel berikut:

- 1) Penguatan konektivitas antarwilayah baik daratan maupun kepulauan melalui pengadaan/ peremajaan armada dan penambahan frekuensi layanan transportasi. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki karakteristik wilayah yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis berupa pulau besar dan gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar di Laut Flores menjadikan transportasi sebagai urat nadi utama dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Namun, hingga saat ini, aksesibilitas layanan transportasi antarwilayah masih menghadapi berbagai kendala yang serius.

Diantara kendala tersebut adalah Jumlah armada transportasi terbatas, baik di darat maupun laut. Banyak armada yang sudah tua dan tidak laik operasi, sehingga kapasitas angkut menjadi berkurang; frekuensi layanan rendah, terutama pada jalur laut antar pulau, menyebabkan ketergantungan masyarakat pada jadwal kapal tertentu yang tidak selalu tersedia setiap hari; dan keterisolasian wilayah masih terjadi, khususnya di pulau-pulau kecil dan terpencil, yang hanya bisa diakses dengan perahu rakyat tanpa standar keselamatan memadai. Dampak langsung dari keterbatasan ini adalah tingginya biaya logistik, keterlambatan distribusi barang kebutuhan pokok, serta terhambatnya akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

- 2) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik dan aman.

Konektivitas antarwilayah, baik di daratan maupun antar pulau, sangat bergantung pada kondisi infrastruktur transportasi yang tersedia. Namun, hingga saat ini kualitas dan kapasitas sarana prasarana transportasi masih terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal. Kondisi tersebut antara lain banyak sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi rusak, tidak memiliki fasilitas dasar (penerangan, ruang tunggu, alat keselamatan), sehingga membahayakan keselamatan penumpang; terminal penumpang belum berfungsi optimal, perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) masih minim dan banyak yang tidak terpelihara; armada transportasi, baik darat maupun laut, sudah berusia tua dan tidak sesuai kebutuhan jumlah penumpang maupun barang; dan serapan anggaran pemeliharaan rendah, sehingga banyak infrastruktur cepat rusak dan tidak laik fungsi.

- 3) Penambahan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas.

Keselamatan lalu lintas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan transportasi darat. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, tingkat keselamatan lalu lintas masih tergolong rendah, tercermin dari : Keterbatasan fasilitas keselamatan jalan seperti rambu, marka, lampu lalu lintas, serta alat pengendali kecepatan masih minim dan sebagian dalam kondisi rusak; terminal dan simpul transportasi belum tertata dimana terminal penumpang belum berfungsi optimal sebagai pusat pengaturan lalu lintas angkutan umum; pengujian berkala kendaraan bermotor tidak optimal terlihat dari realisasi anggaran pada 2024–2025 menunjukkan nihil pelaksanaan, sehingga banyak kendaraan beroperasi tanpa jaminan laik jalan; dan kesadaran pengguna jalan rendah nampak dari masih banyaknya pelanggaran seperti tidak menggunakan helm/sabuk pengaman, muatan berlebih, serta pengemudi tanpa SIM. Hal ini menuntut perhatian serius melalui penambahan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang digariskan dalam RPJMD. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”**. Sedangkan dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif.**
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
3. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan.
5. **Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah.**
6. Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama.
7. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Pelayanan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2025 – 2029, yaitu :

Misi ke-1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif

Pelayanan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-1, terkait dengan **tujuan**: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan **sasaran 1**, yaitu Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif.

Misi ke-5 : Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Pelayanan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-5, terkait dengan **tujuan**: meningkatkan konektivitas wilayah dengan **sasaran I5**, yaitu meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata.

Dengan demikian rumusan pernyataan tujuan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, yaitu **meningkatkan konektivitas wilayah yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan** dengan indikator capaian dari tujuan ini adalah **jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi** (orang/ton). Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat mobilitas masyarakat serta intensitas arus distribusi logistik di wilayah Kabupaten. Data ini mencerminkan seberapa besar peran transportasi dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Jumlah penumpang menunjukkan kebutuhan dan kecenderungan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun udara, sedangkan jumlah barang mencerminkan tingkat pergerakan komoditas, baik hasil produksi, konsumsi, maupun distribusi antarwilayah.

Melalui indikator ini, Dinas Perhubungan dapat memetakan pola pergerakan penumpang dan barang secara lebih akurat, sehingga kebijakan pembangunan dan pengelolaan transportasi dapat diarahkan sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Peningkatan jumlah penumpang dan barang yang terangkut akan menjadi bukti semakin baiknya konektivitas, ketersediaan layanan, dan keandalan sistem transportasi. Pada saat yang sama, indikator ini juga menjadi dasar evaluasi dalam menjaga keseimbangan antara kapasitas sarana prasarana dengan pertumbuhan mobilitas masyarakat dan distribusi barang agar tercipta sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan.

3.2 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Sebagai bagian dari upaya mendukung tercapainya visi pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan beberapa sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2025–2029, yaitu:

- a. Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten (%)**
- b. Jumlah fasilitas transportasi antarwilayah yang dibangun/ditingkatkan (Unit)**

Kedua indikator tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian dari sasaran strategis tersebut, yaitu:

1. Persentase perlengkapan jalan terpasang dibandingkan kondisi ideal pada jalan kabupaten (%)

Indikator ini menunjukkan sejauh mana perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), guardrail, cermin tikung, serta perlengkapan keselamatan lainnya telah terpasang sesuai standar kebutuhan di setiap ruas jalan kabupaten.

Indikator ini sangat penting karena ketersediaan perlengkapan jalan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga menjadi faktor utama dalam mewujudkan keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas.

Semakin tinggi persentase pencapaian terhadap kondisi ideal, semakin baik kualitas pelayanan jalan yang dirasakan oleh masyarakat.

Dengan indikator ini, Pemerintah Daerah dapat mengukur efektivitas dalam pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, serta mengidentifikasi ruas jalan yang masih membutuhkan perbaikan.

Dengan demikian, indikator ini menjadi alat ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam mendukung tercapainya transportasi darat yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Jumlah fasilitas transportasi antarwilayah yang dibangun/ditingkatkan (unit)

Indikator ini mengukur tingkat komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas transportasi yang layak, aman, dan memadai guna meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Fasilitas transportasi yang dimaksud meliputi dermaga penyeberangan, pelabuhan rakyat, terminal angkutan, halte, serta infrastruktur pendukung lainnya yang berfungsi sebagai katalis mobilitas masyarakat dan distribusi barang antar pulau maupun antar kecamatan.

Peningkatan fasilitas transportasi tidak hanya fokus pada pembangunan baru, tetapi juga pada rehabilitasi, pemeliharaan, dan modernisasi fasilitas yang sudah ada agar sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Indikator ini sangat penting karena keberadaan fasilitas transportasi yang memadai akan memperkuat integrasi wilayah, memperlancar arus logistik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Dengan tercapainya indikator ini, diharapkan akan terwujud transportasi yang lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah kepulauan.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Pembangunan infrastruktur yang merata	Meningkatkan konektivitas wilayah yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan		Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi (Orang/Ton)	311.173	326.737	343.068	360.222	378.233	397.144
1. Permenhub 96 Tahun 2015 → dasar analisis kebutuhan 2. Permenhub 13 Tahun 2014 → standar rambu 3. Permenhub 34 Tahun 2014 → standar marka 4. Permenhub 49 Tahun 2014 → standar APILL		Meningkatnya keselamatan dan kelengkapan sarana prasarana transportasi darat	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten (%)	51,41	53,50	53,59	54,19	54,43	54,46
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017		Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi antarwilayah	Jumlah fasilitas transportasi antarwilayah yang dibangun/ditingkatkan (Unit)	3	2	2	2	3	3
PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan	77,00 (B)	80,00 (B)	83,00 (B)	86,00 (B)	89,00 (B)	91,00 (A)
			Nilai SAKIP Pertingkat Daerah	65,00 (C)	70,00 (B)	75,00 (B)	80,00 (B)	85,00 (BB)	90,00 (A)

3.3. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam rencana pembangunan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan pendekatan yang holistik, terukur, dan adaptif. Berikut adalah strategi yang diterapkan pada setiap tahapan pelaksanaan :

a) Tahap 1 (2026) Konsolidasi & Pemulihan

Konsolidasi & Pemulihan pada tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar 2025–2029 merupakan fase strategis yang berfokus pada penguatan pondasi internal dan penataan kembali sistem penyelenggaraan layanan perhubungan. Konsolidasi dimaknai sebagai upaya menyelaraskan arah kebijakan, strategi, dan program Dinas Perhubungan agar sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD. Langkah ini meliputi penataan kelembagaan, evaluasi kinerja periode sebelumnya, integrasi basis data transportasi darat dan laut, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Melalui konsolidasi, seluruh komponen internal maupun eksternal diharapkan dapat bergerak secara terpadu dan fokus dalam mencapai sasaran pembangunan transportasi daerah.

Pemulihan bermakna sebagai proses mengembalikan kualitas layanan transportasi ke standar minimal yang layak, setelah adanya penurunan kinerja, kerusakan infrastruktur, atau terhambatnya operasional pada periode sebelumnya. Tahap ini mencakup rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan, revitalisasi trayek angkutan yang tidak aktif, peremajaan armada, serta peningkatan kompetensi SDM perhubungan. Dengan pemulihan yang efektif, pelayanan transportasi di Kepulauan Selayar diharapkan kembali normal, aman, nyaman, dan terjangkau, sehingga menjadi landasan yang kuat untuk masuk ke fase pengembangan, modernisasi, dan optimalisasi pada tahun-tahun berikutnya.

b) Tahap 2 (2027) Perluasan Layanan

Perluasan Layanan pada tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar 2025–2029 merupakan tahap pengembangan jangkauan dan kapasitas layanan transportasi untuk meningkatkan konektivitas wilayah, terutama antar pulau dan daerah terpencil. Tahap ini difokuskan pada pembukaan trayek baru, penambahan armada, peningkatan frekuensi perjalanan, serta pembangunan atau penambahan fasilitas pendukung seperti terminal, pelabuhan, dan halte. Perluasan layanan juga mencakup optimalisasi jaringan transportasi darat dan laut agar lebih merata, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat

serta arus distribusi barang. Dengan strategi ini, aksesibilitas antar wilayah dapat ditingkatkan, perekonomian lokal terdorong, dan kesenjangan pelayanan transportasi antar daerah dapat diminimalkan.

c) Tahap 3 (2028) Modernisasi & Digitalisasi

Modernisasi & Digitalisasi pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar 2025–2029 merupakan tahap transformasi layanan transportasi menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi. Modernisasi dilakukan melalui pembaruan armada, peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan dan terminal dengan standar keselamatan dan kenyamanan yang lebih tinggi, serta penerapan peralatan modern untuk pengaturan lalu lintas dan keselamatan pelayaran. Sementara itu, digitalisasi diarahkan pada pengembangan sistem informasi transportasi terpadu, seperti aplikasi pemesanan dan pelacakan jadwal, sistem pembayaran non-tunai, serta integrasi data operasional untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Tahap ini diharapkan mampu menghadirkan layanan transportasi yang lebih cepat, akurat, mudah diakses, dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta tuntutan masyarakat modern.

d) Tahap 4 (2029) Optimalisasi & Efisiensi

Optimalisasi & Efisiensi pada tahun keempat pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar 2025–2029 merupakan tahap pemantapan kinerja melalui pemanfaatan maksimal seluruh sumber daya yang tersedia dengan biaya, waktu, dan tenaga yang seefisien mungkin. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan kapasitas infrastruktur, armada, dan jaringan transportasi yang telah dibangun, termasuk memperbaiki pola operasional agar lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat. Efisiensi diarahkan pada pengurangan pemborosan anggaran dan sumber daya, penerapan manajemen berbasis kinerja, serta pemeliharaan preventif untuk memperpanjang umur layanan sarana dan prasarana. Dengan langkah ini, kualitas dan jangkauan layanan transportasi dapat tetap meningkat tanpa harus selalu bergantung pada penambahan anggaran, sehingga keberlanjutan pelayanan publik dapat terjaga secara konsisten dan berdaya guna.

e) Tahap 5 (2030) Capaian Penuh & Keberlanjutan

Capaian Penuh & Keberlanjutan pada tahun kelima pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar 2025–2029 merupakan tahap pencapaian target akhir secara optimal sekaligus memastikan seluruh hasil pembangunan transportasi dapat terus berfungsi dan memberikan manfaat jangka panjang. Pada fase ini, seluruh indikator kinerja utama diharapkan mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan, baik dalam aspek kualitas layanan, keselamatan, konektivitas, maupun kepuasan

pengguna. Keberlanjutan diwujudkan melalui penguatan sistem pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan armada secara profesional, penerapan inovasi berkelanjutan, serta pengembangan kapasitas SDM untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan. Dengan demikian, manfaat pembangunan transportasi tidak hanya dirasakan pada akhir periode Renstra, tetapi juga menjadi pondasi yang kokoh bagi keberlanjutan pelayanan di periode-periode berikutnya.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahap 1 2026	Tahap 2 2027	Tahap 3 2028	Tahap 4 2029	Tahap 5 2030
Konsolidasi & Pemulihan	Perluasan Layanan	Modernisasi & Digitalisasi	Optimalisasi & Efisiensi	Capaian Penuh & Keberlanjutan
Akuntabilitas :	Akuntabilitas :	Akuntabilitas :	Akuntabilitas :	Akuntabilitas :
<ul style="list-style-type: none"> - perencanaan yang berbasis data, pelaporan kinerja yang terbuka kepada publik, pengawasan internal yang ketat, serta evaluasi rutin terhadap capaian indikator 	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan dermaga dan pelabuhan kecil, pembukaan rute kapal penumpang/ro-ro antar pulau, dan peningkatan frekuensi pelayaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan prioritas modernisasi berdasarkan hasil audit kondisi infrastruktur, performa armada, dan kebutuhan layanan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - optimalisasi layanan kepada masyarakat, termasuk peningkatan kualitas tanpa penambahan anggaran besar 	<ul style="list-style-type: none"> - pelaporan akhir capaian kinerja secara terbuka, evaluasi menyeluruh atas efektivitas program dan kegiatan, audit pemanfaatan anggaran, serta dokumentasi praktik baik (best practices) yang dapat dijadikan acuan untuk periode berikutnya
<ul style="list-style-type: none"> - pemulihan dan penataan kembali layanan transportasi berjalan transparan, terukur, dan adaptif 	<ul style="list-style-type: none"> - penetapan prioritas perluasan layanan yang terdokumentasi jelas, penganggaran yang berbasis kinerja, serta pelaporan capaian jangkauan dan kualitas layanan 			
Inovasi :	Inovasi :	Inovasi :	Inovasi :	Inovasi :
<ul style="list-style-type: none"> - pemanfaatan teknologi untuk pendataan kondisi sarana prasarana - sistem pelaporan kerusakan secara daring 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatkan kualitas, kenyamanan, dan efisiensi layanan transportasi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar 	<ul style="list-style-type: none"> - penerapan teknologi baru, metode kerja cerdas, dan solusi kreatif untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, kenyamanan, serta kualitas layanan transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> - penerapan metode, teknologi, dan pendekatan kerja baru untuk memaksimalkan kinerja layanan transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan sistem continuous provement berbasis data kinerja, pemanfaatan teknologi prediktif untuk perencanaan pemeliharaan infrastruktur, penerapan skema pembiayaan kreatif seperti public-private partnership untuk menjaga keberlanjutan layanan, serta pengembangan pusat inovasi transportasi yang menguji coba metode baru sebelum diterapkan

3.4. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis terhadap tantangan, isu strategis, serta peluang dan strategi untuk memastikan relevansi keberlanjutan perencanaan perangkat daerah maka dirumuskan arah kebijakan secara komprehensif tentang cara dan respon mencapai tujuan, sasaran dan strategi dengan efektif dan efisien yang diwujudkan dalam perumusan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

Tabel 3.4 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	2	3	4
1.	Pengoptimalan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Pengembangan infrastruktur transportasi yang merata, andal, dan berkelanjutan	Meningkatkan penyediaan fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, guardrail, penerangan)
2.	Optimalisasi Layanan Angkutan Laut	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi antar wilayah	Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi

BAB VI
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penjabaran cascading Rencana Strategis secara operasional yang lebih rinci ke dalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, disertai indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, dirancang sesuai dengan perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah serta mengakomodir beberapa isu strategis yang ingin dicapai pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan kolaboratif.						
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Nilai SAKIP Pertingkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Persentase Capaian Kinerja OPD Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terwujudnya penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah secara tepat waktu.	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
						Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
						Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Meningkatnya tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah melalui	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				penyelesaian dokumen dan laporan keuangan tepat waktu.	diselesaikan tepat waktu		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						Koordinasi dan Panilaian Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terwujudnya tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai kewenangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi pendapatan daerah yang disusun tepat waktu	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
						Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
						Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
						Pengolahan Data Retribusi Daerah	
						Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Meningkatnya kinerja aparatur Perangkat Daerah yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
						Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Pemindahan Tugas ASN	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi umum kantor pada Perangkat Daerah.	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/ Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana melalui ketersediaan Barang Milik Daerah yang sesuai kebutuhan.	Persentase Petersediaan BMD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Alat Besar	
						Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas dan keberlanjutan pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui pemeliharaan yang optimal.	Persentase BMD dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
	Meningkatkan konektivitas wilayah yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan				Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi		
		Meningkatnya keselamatan dan kelengkapan sarana prasarana transportasi darat			Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten (%)		
			Meningkatnya Kualitas layanan transportasi darat		Kinerja lalu lintas (V/C Ratio)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten/ Kota yang	Persentase penetapan dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				terintegrasi dan berkelanjutan			
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
						Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
						Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan pada ruas jalan kabupaten/kota sesuai dengan standar teknis guna mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas.	Persentase Perlengkapan Jalan yang di Bangun di Jalan Kabupaten sesuai rencana	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	
						Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Meningkatnya fungsi dan pelayanan Terminal Penumpang Tipe C sesuai standar pelayanan.	Persentase pemenuhan standar pelayanan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
						Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	
						Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	
						Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
						Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	
						Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
						Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Meningkatnya ketertiban dan kepatuhan penyelenggaraan serta pembangunan fasilitas parkir sesuai ketentuan	Persentase izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan sesuai ketentuan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				peraturan perundang-undangan			
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya keselamatan dan kelaikan operasional kendaraan bermotor melalui melaksanakan pengujian berkala sesuai ketentuan	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus pengujian berkala	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
						Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Meningkatnya kelancaran, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten/kota melalui penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Persentase ruas jalan yang menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	
						Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
						Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	
						Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
						Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	
						Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
						Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	
						Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
						Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
						Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	
				Terlaksananya persetujuan Andalalin sesuai ketentuan pada jalan kabupaten/kota.	Persentase persetujuan hasil Andalalin yang diterbitkan sesuai ketentuan	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
						Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
						Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	
				Meningkatnya identifikasi dan penanganan risiko keselamatan lalu lintas di jalan	Persentase lokasi/ ruas jalan yang telah dilakukan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
						Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
						Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
				Meningkatnya pelayanan angkutan umum antar kota	Persentase ketersediaan layanan angkutan umum antar	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				dalam satu daerah kabupaten/kota.	kota dalam satu daerah kabupaten/kota	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	
						Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya kawasan perkotaan lintas daerah sebagai dasar pelayanan angkutan perkotaan	Persentase penetapan kawasan perkotaan lintas daerah untuk pelayanan angkutan perkotaan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi antarwilayah			Jumlah fasilitas transportasi antarwilayah yang dibangun/ditingkatkan (Unit)		
			Meningkatnya		Persentase Sarana dan Prasarana	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
			Layanan transportasi laut		Perhubungan Laut yang beroperasi dan Layak Fungsi		
				Terwujudnya pelayanan perizinan usaha angkutan laut yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase izin usaha angkutan laut yang diterbitkan tepat waktu	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya tertib administrasi dan legalitas usaha angkutan laut pelayaran rakyat	Persentase izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat yang diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya tertib administrasi dan legalitas badan usaha penyelenggara angkutan penyeberangan	Persentase izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan yang diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem	
				Terwujudnya penetapan lintas penyeberangan yang tertib dan sesuai kebutuhan pelayanan transportasi daerah	Persentase lintas penyeberangan yang ditetapkan sesuai ketentuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terwujudnya penetapan lintas penyeberangan yang tertib dan sesuai ketentuan	Persentase lintas penyeberangan yang ditetapkan sesuai ketentuan	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya tertib administrasi dan legalitas usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal	Persentase izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	
				Terwujudnya penetapan tarif angkutan penyeberangan yang adil dan sesuai ketentuan	Persentase penetapan tarif angkutan penyeberangan yang ditetapkan sesuai ketentuan	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terwujudnya penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan lokal.	Persentase dokumen Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan.	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelabuhan pengumpan lokal	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun/ditingkatkan sesuai rencana	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	
				Meningkatnya tertib administrasi dan legalitas badan usaha pelabuhan	Persentase izin usaha badan usaha pelabuhan yang diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Meningkatnya tertib administrasi dan kepastian hukum pengembangan pelabuhan pengumpan lokal	Persentase izin pengembangan pelabuhan pengumpan lokal yang diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Meningkatnya kelancaran dan kepastian layanan operasional Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal selama 24 jam yang diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Meningkatnya tertib administrasi dan kepastian hukum pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal	Persentase izin pekerjaan pengerukan yang diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Meningkatnya tertib administrasi dan kepastian hukum pelaksanaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal	Persentase izin reklamasi yang diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Meningkatnya tertib administrasi dan kepastian hukum pengelolaan TUKS di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal	Persentase izin pengelolaan TUKS yang diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Lokal	
			Meningkatkan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)		Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	
				Terwujudnya penerbitan izin mendirikan bangunan helipad sesuai ketentuan	Persentase lokasi tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang memenuhi persyaratan teknis dan Keselamatan	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	
						Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN X.XX													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja OPD		90%	6.336.543.000	90%	5.011.775.300	90%	4.950.055.000	90%	5.204.466.100	90%	5.400.064.900	
<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD		95%		95%		95%		95%		95%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	
<i>Terwujudnya penyelesaian dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah secara tepat waktu.</i>													
Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen	5	4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.500.000	5	3.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perencanaan Perangkat Daerah <i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Perencanaan Perangkat Daerah												
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD <i>Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD		1	1.875.000	1	1.875.000	1	1.875.000	1	1.875.000	1	1.875.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD <i>Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	1.375.000	1	1.375.000	1	1.375.000	1	1.375.000	1	1.375.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD <i>Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		1	1.875.000	1	1.875.000	1	1.875.000	1	1.875.000	1	1.875.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>													
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD <i>Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	1.375.000	1	1.375.000	1	1.375.000	1	1.375.000	1	1.375.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <i>Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	2.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <i>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah <i>Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah <i>Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah</i>	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah <i>Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD <i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu <i>Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu</i>	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan <i>Tercapainya Sinkronisasi dan</i>	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan</i>	Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan												
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> <i>Meningkatnya tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah melalui penyelesaian dokumen dan laporan keuangan tepat waktu.</i>	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	100	4.144.010.500	100	3.999.507.700	100	3.954.869.000	100	4.144.010.500	100	4.144.010.500	
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> <i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		61	4.139.010.500	59	3.994.507.700	59	3.949.869.000	59	4.139.010.500	59	4.139.010.500	
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> <i>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD <i>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD <i>Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <i>Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan <i>Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD <i>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semest eran SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD		4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran <i>Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah <i>Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Persentase Peyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD <i>Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD <i>Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Panilaian Barang Milik Daerah SKPD <i>Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD <i>Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD <i>Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD <i>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD <i>Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah <i>Terwujudnya tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	Persentase laporan administrasi pendapatan daerah yang disusun tepat waktu												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>sesuai kewenangan Perangkat Daerah</i>													
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah <i>Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah <i>Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah Dan Kebijakan Retribusi Daerah</i>	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah <i>Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah</i>														
Pengolahan Data Retribusi Daerah <i>Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penetapan Wajib Retribusi Daerah <i>Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah</i>	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah <i>Tersedianya Laporan engelolaan Retribusi Daerah</i>	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <i>Meningkatnya kinerja aparatur Perangkat Daerah yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.</i>	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai <i>Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya <i>Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian <i>Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian <i>Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai <i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemulangan Pegawai yang Pensiun <i>Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun</i>	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas <i>Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas</i>	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemindahan Tugas ASN <i>Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN</i>	Jumlah ASN yang dipindahtugask an		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>													
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan <i>Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan <i>Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi eraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi umum kantor pada Perangkat Daerah.</i>	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100	100	663.233.700	100	196.581.600	100	196.500.000	100	196.769.600	100	312.368.400	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		55	1.000.000	55	1.000.000	55	1.000.000	55	1.000.000	55	1.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i>	Kantor yang Disediakan												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor <i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	75.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	5	18.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga <i>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor <i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.269.600	613	15.368.400	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan <i>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2	11.233.700	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	145	8.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan <i>Persediaan Bahan Bacaan dan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan		12	25.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Peraturan Perundang-undangan</i>													
Penyediaan Bahan/Material <i>Tersedianya Bahan/Material</i>	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan												
Fasilitasi Kunjungan Tamu <i>Terlaksananya Fasilitasi unjungan Tamu</i>	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	380.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	175	250.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD <i>Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD <i>Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Berbasis Elektronik pada SKPD</i>													
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <i>Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana melalui ketersediaan Barang Milik Daerah yang sesuai kebutuhan.</i>	Persentase ketersediaan BMD												
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <i>Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <i>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>Tersedianya Alat Besar</i>														
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor <i>Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan</i>	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Mebel <i>Tersedianya Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <i>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya <i>Persediaan Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Aset Tak Berwujud <i>Tersedianya Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <i>Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Sarana dan	Jumlah Unit Sarana dan													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Unit atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.</i>	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	860.168.800	100	590.056.600	100	590.056.600	100	590.056.600	100	590.056.600	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat <i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik <i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor <i>Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	760.168.800	12	490.056.000	12	490.056.000	12	490.056.000	12	490.056.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Meningkatnya kualitas dan keberlanjutan pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui pemeliharaan yang optimal.</i>	Persentase BMD dalam kondisi baik	100	100	656.630.000	100	213.130.000	100	196.130.000	100	261.130.000	100	341.130.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan		1	38.630.000	1	38.630.000	1	38.630.000	1	38.630.000	1	38.630.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12	300.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar <i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</i>	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor <i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</i>	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan Mebel <i>Terlaksananya Pemeliharaan Mebel</i>	Jumlah Mebel yang Dipelihara												
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya <i>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3	18.000.000	3	2.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya <i>Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>													
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	300.000.000	1	22.000.000	1	5.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>														
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah <i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah</i>	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/R ehabilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) <i>Meningkatnya Kualitas layanan transportasi darat</i>	Kinerja lalu lintas (V/C Ratio)		0,32	1.325.000.000	0,37	538.768.000	0,43	616.400.500	0,49	662.431.400	0,56	753.663.200		
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota <i>Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten/ Kota yang terintegrasi dan berkelanjutan</i>	Persentase penetapan dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota													
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>														
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota <i>Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencan Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota <i>Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Ditetapkannya Dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota</i>													
Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota <i>Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ kota</i>	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota <i>Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota												
Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota</i>	Jaringan LLAJ abupaten/Kota												
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota <i>Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan pada ruas jalan kabupaten/kota sesuai dengan standar teknis guna mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas.</i>	Persentase Perlengkapan Jalan yang di Bangun di Jalan Kabupaten sesuai rencana	100	100	1.250.000.000	100	500.000.000	100	575.000.000	100	600.000.000	100	575.000.000	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota <i>Terbangunnya Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota <i>Tersedianya Perlengkapan</i>	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia		30	1.100.000.000	20	400.000.000	10	475.000.000	10	500.000.000	10	475.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>														
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan <i>Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</i>	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan <i>Terlaksananya Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		188	150.000.000	188	100.000.000	188	100.000.000	188	100.000.000	188	100.000.000		
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C <i>Meningkatnya fungsi dan pelayanan Terminal Penumpang Tipe C sesuai standar pelayanan.</i>	Persentase pemenuhan standar pelayanan Terminal Penumpang Tipe C	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	16.400.500	100	20.000.000	100	20.000.000		
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C <i>Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C</i>	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C <i>Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C</i>	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi		1	20.000.000	1	20.000.000	1	16.400.500	1	20.000.000	1	20.000.000	
Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) <i>Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)</i>	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C <i>Tersedianya sistem informasi manajemen Terminal Penumpang tipe C</i>	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang <i>Terbangunnya Terminal Tipe</i>	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang</i>													
Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C <i>Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C</i>	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) <i>Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)</i>	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir <i>Meningkatnya ketertiban dan kepatuhan penyelenggaraan serta pembangunan fasilitas parkir sesuai</i>	Persentase izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan sesuai ketentuan												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>ketentuan peraturan perundang-undangan</i>														
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <i>Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kewenangan Kabupaten/Kota <i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan erbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota												
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor <i>Meningkatnya keselamatan dan kelaikan operasional kendaraan bermotor melalui pelaksanaan pengujian berkala sesuai ketentuan</i>	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus pengujian berkala												
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor <i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>Peningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Ditingkatkan Kapasitasnya													
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor <i>Terdaftarndanya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor <i>Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor <i>Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji</i>	Kendaraan Bermotor Wajib Uji													
<i>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Monitoring dan Evaluasi</i>	Jumlah Laporan Monitoring dan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor <i>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Evaluasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota <i>Meningkatnya kelancaran, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten/kota melalui penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas</i>	Persentase ruas jalan yang menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan		66,67	25.000.000	83,33	18.768.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	128.663.200	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota <i>Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas</i>	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		12	25.000.000	12	18.768.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	28.663.200	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota</i>														
Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum <i>Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan <i>Terlaksananya Identifikasi an pengawasan terhadap Implementasi Batas kecepatan</i>	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) <i>Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah</i>	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTPUT/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Monitoring dan evaluasi Rute Aman Sekolah Selamat Sekolah (RASS) <i>Terlaksananya Identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Sekolah Selamat Sekolah (RASS)</i>	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS) <i>Terlaksananya Identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)</i>	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum <i>Meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan <i>Terbangunnya implementasi batas kecepatan</i>	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) <i>Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)</i>	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota <i>Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>														
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas <i>Terlaksananya Pengadaan dan emasanagan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</i>	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		-	-	-	-	-	-	-	-	40	100.000.000		
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota <i>Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Prov insi</i>	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Prov insi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas <i>Terselenggaranya Sistem manajemen Transportasi Cerdas</i>	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen ransportasi Cerdas													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota <i>Terlaksananya persetujuan Andalalin sesuai ketentuan pada jalan kabupaten/kota.</i>	Persentase persetujuan hasil Andalalin yang diterbitkan sesuai ketentuan												
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin <i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin</i>	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin <i>Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin</i>	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin <i>Terlaksananya Pengawasan</i>	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin</i>														
Penetapan Dokumen Teknis Andalalin <i>Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin</i>	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan <i>Meningkatnya identifikasi dan penanganan risiko keselamatan lalu lintas di jalan.</i>	Persentase lokasi/ruas jalan yang telah dilakukan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ													
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal <i>Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota <i>Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>	Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota													
Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C <i>Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan</i>	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum <i>Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen</i>	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum													
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan <i>Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i>	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor <i>Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa	Persentase ketersediaan layanan	100	22,73	30.000.000	-	-	-	-	30,30	17.431.400	37,88	30.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota <i>Meningkatnya pelayanan angkutan umum antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota.</i>	angkutan umum antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota												
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota <i>Terkendalinya Dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		12	30.000.000	-	-	-	12	17.431.400	12	30.000.000		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota <i>Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia												
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota <i>Tersedianya kawasan perkotaan lintas daerah sebagai dasar pelayanan angkutan perkotaan</i>	Persentase penetapan kawasan perkotaan lintas daerah untuk pelayanan angkutan perkotaan												
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota <i>Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan</i>	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota													
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota <i>Tersosialisasinya Dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN <i>Meningkatnya layanan transportasi lau</i>	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang beroperasi dan Layak Fungsi		50,82	1.500.000.000	54,84	1.002.921.100	58,73	1.066.262.600	62,50	1.081.674.800	66,67	1.809.877.100	
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/ Kota dan Beroperasi pada Lintas	Persentase izin usaha angkutan laut yang diterbitkan tepat waktu												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota <i>Terwujudnya pelayanan perizinan usaha angkutan laut yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</i>													
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <i>Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota <i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota												
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota <i>Meningkatnya tertib administrasi dan legalitas usaha angkutan laut pelayaran rakyat</i>	Persentase izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat yang diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan												
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <i>Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota <i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan	Persentase izin usaha penyelenggaraa												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha <i>Meningkatnya tertib administrasi dan legalitas badan usaha penyelenggara angkutan penyeberangan</i>	n angkutan penyeberangan yang diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan													
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <i>Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara</i>	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraa n Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>														
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota <i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota <i>Terwujudnya penetapan lintas penyeberangan yang tertib dan sesuai kebutuhan pelayanan transportasi daerah</i>	Persentase lintas penyeberangan yang ditetapkan sesuai ketentuan												
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dalam Daerah Kabupaten/Kota <i>Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<p>dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Terkendalinya Dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan penyeberangan dan disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i></p>	<p>Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>												
<p>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Terwujudnya penetapan lintas penyeberangan yang tertib dan sesuai ketentuan</i></p>	<p>Persentase lintas penyeberangan yang ditetapkan sesuai ketentuan</p>												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota <i>Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan Dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai danau dan penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan Pengoperasian untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota													
Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal <i>Meningkatnya tertib administrasi dan legalitas usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal</i>	Persentase izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan													
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik <i>Terfasilitasinya Pemenuhan</i>	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan kapal dalam system pelayaran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	Secara Elektronik												
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal</i> <i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal</i>	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase penetapan tarif angkutan penyeberangan yang ditetapkan sesuai ketentuan												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>Terwujudnya penetapan tarif angkutan penyeberangan yang adil dan sesuai ketentuan</i>														
Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota <i>Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota <i>Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota <i>Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta</i>	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota</i>													
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal <i>Terwujudnya penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan lokal.</i>	Persentase dokumen Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan.	100	38,60	200.000.000	45,61	200.000.000	52,61	250.000.000	59,65	250.000.000	66,67	500.000.000	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal <i>Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Pelabuhan Pengumpulan Lokal</i>													
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal <i>Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal</i>	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal <i>Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan</i>	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>													
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal <i>Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelabuhan pengumpan lokal</i>	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun/ditingkatkan sesuai rencana	100	100	1.300.000.000	100	802.921.100	100	816.262.600	100	831.674.800	100	1.309.877.100	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal <i>Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal</i>	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal <i>Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		2	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal <i>Teroperasinya Dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		4	800.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	4	800.000.000	
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal <i>Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		12	100.000.000	12	102.921.100	12	116.262.600	12	131.674.800	12	109.877.100	
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan local <i>Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal</i>	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal <i>Meningkatnya tertib administrasi dan legalitas badan usaha pelabuhan</i>	Persentase izin usaha badan usaha pelabuhan yang diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik <i>Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal <i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi</i>	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>														
Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal <i>Meningkatnya tertib administrasi dan kepastian hukum pengembangan pelabuhan pengumpan lokal</i>	Persentase izin pengembangan pelabuhan pengumpan lokal yang diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan													
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik <i>Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk</i>	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dilaksanakan													
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Pelabuhan Pengumpan Lokal Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal <i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal</i>	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal selama 24 jam yang												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Meningkatnya kelancaran dan kepastian layanan operasional Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan												
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <i>Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilakukan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal <i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Loka</i>	dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Loka												
Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal <i>Meningkatnya tertib administrasi dan kepastian hukum pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal</i>	Persentase izin pekerjaan pengerukan yang diterbitkan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan												
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <i>Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal <i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan</i>	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Dilakukan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal</i>														
Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal <i>Meningkatnya tertib administrasi dan kepastian hukum pelaksanaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan lokal</i>	Persentase Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang diterbitkan													
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <i>Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan</i>	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal <i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi Di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal <i>Meningkatnya tertib administrasi dan kepastian hukum pengelolaan TUKS di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal</i>	Persentase Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan												
Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	Jumlah Dokumen Pemenuhan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <i>Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan</i>													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Lokal</i>	Pelabuhan Pengumpulan Lokal												
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN <i>Meningkatkan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)</i>	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	0	0	0	100	878.000	100	848.400	100	784.500	100	779.400	
<i>Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter</i> <i>Terwujudnya penerbitan izin mendirikan bangunan helipad sesuai ketentuan</i>	Persentase lokasi tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan	0	0	0	100	878.000	100	848.400	100	784.500	100	779.400	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			RENCANA 2026		RENCANA 2027		RENCANA 2028		RENCANA 2029		RENCANA 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter <i>Terfasilitasinya Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter</i>	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	0	0	0	100	878.000	100	848.400	100	784.500	100	779.400	

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat	Meningkatnya kualitas layanan transportasi perkotaan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatkan Prasarana Dasar Perhubungan Wilayah Kepulauan	Meningkatnya konektivitas Prasarana Transportasi Wilayah Kepulauan	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
			Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
			Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

No	IKU (Indikator Kinerja Utama)	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Angka	311.173	326.737	343.068	360.222	378.233	397.144	
2	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten	Persen	51,41	53,50	53,96	54,19	54,43	54,46	
3	Jumlah fasilitas transportasi antarwilayah yang dibangun/ditingkatkan	Angka	3	3	2	2	2	3	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan	Angka	77,00 (B)	80,00 (B)	83,00 (B)	86,00 (B)	89,00 (B)	91,00 (A)	
5	Nilai SAKIP	Angka	65,00 (B)	70,00 (B)	75,00 (B)	80,00 (B)	85,00 (BB)	90,00 (A)	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan

No	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Kinerja lalu lintas (VC Ratio)	Angka	0,28	0,32	0,37	0,43	0,49	0,56	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang beroperasi dan Layak Fungsi	Persen	45,76	50,82	58,84	58,73	62,50	66,67	
3	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	Persen	0	100	100	100	100	100	

Tabel 4.6 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs

Kode Indikator				Target / Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGs Tahun					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	1	2	(a)	Jumlah Bandara	Unit	1	1	1	1	1	1	1
9	1	2	(b)	Jumlah Dermaga Penyeberangan	Unit	2	2	2	2	2	2	2

BAB V **P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan jangka lima tahun yang berisi arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, indikator, dan target kinerja di bidang perhubungan. Renstra ini dibuat sebagai bagian dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Perhubungan dalam melakukan tugas, mengelola sumber daya, serta memandu kinerja agar dapat menciptakan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan Renstra ini, dibutuhkan komitmen, kerja sama, serta kolaborasi antar sektor, dengan memperhatikan kemampuan pendanaan daerah.

Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara rutin bersama Unit Kerja Bapperida untuk menilai hasil kerja, mengidentifikasi hambatan, serta merancang langkah perbaikan.

Dengan pengawasan yang konsisten, Renstra ini diharapkan bisa mendukung pembentukan sistem transportasi yang kompetitif dan berkontribusi pada kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 25 September 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

#

Drs. SUARDI, M.M.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020

PEMETAAN VISI, MISI, PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	PEMBANGUNAN TEMATIK	RENCANA AKSI	KEGIATAN
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
BERSAMA MEMBAWA SELAYAR MAJU & SEJAHTERA	MAJU	5. Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Membangun desa, menata kota	Program Pengembangan Prasarana Transportasi	Pengembangan sistem transportasi terkoneksi dan terintegrasi dalam rangka "Pemekaran Daerah"	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Pengembangan Destinasi Pariwisata (Desa Wisata) dan Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah	1. Pengadaan Guadrail di Bontomarannu 2. Pengadaan LPJU 3. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
						Pembangunan dan Rehabilitasi Tambatan Perahu	Program Pengelolaan Pelayaran	Pengembangan Destinasi Pariwisata (Desa Wisata)	1. Penyusunan Dokumen Feasibility Study (FS) Pelabuhan Laut P. Latondu, P. Rajuni, P. Tarupa 2. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhan Laut Pasitallu, P. Karumpa, P. Latondu, P. Rajuni, P. Tarupa 3. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pelabuhan Laut P. Madu, P. Tambolongan, Pasitallu, P. Karumpa, P. Rajuni	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
								Pengembangan Destinasi Pariwisata (Desa Wisata)	Pembebasan Lahan Rencana Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal di P. Tambolongan, P. Latondu, dan P. Rajuni	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	PEMBANGUNAN TEMATIK	RENCANA AKSI	KEGIATAN
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Pengumpan Lokal
								Pusat Pelayanan Terpadu Nelayan dan Usaha Perikanan (Hangkoang)	Pembangunan Tambatan Perahu Hakkoang dan Lantibongan	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
								Pengembangan Destinasi Pariwisata (Desa Wisata)	Rehabilitasi/Penambahan Panjang Tambatan Perahu Dongkalang, Tarupa, Rajuni, Latondu, Manarai, Pasitallu Tengah, Lambego, Sambali, Garaupa, Tee Uhu, Buranga, Bonelambere Kayuadi, Labuan Nipayya, Menara Indah, Bahuluang Selatan, Bukit Nane, Kahu-kahu	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	120 Unit	600.000.000	120 Unit	600.000.000	120 Unit	600.000.000	120 Unit	600.000.000	120 Unit	600.000.000
Persentase Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	3 Dok	750.000.000	3 Dok	750.000.000	3 Dok	750.000.000	3 Dok	750.000.000	3 Dok	750.000.000
Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	1 Dok	500.000.000			1 Dok	500.000.000			1 Dok	500.000.000
Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000						

INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	4 Unit	800.000.000	3 Unit	600.000.000	3 Unit	600.000.000	3 Unit	600.000.000	3 Unit	600.000.000